

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya kualitas pendidikan merupakan suatu permasalahan yang sampai sekarang ini masih dihadapi dan di alami oleh bangsa Indonesia. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa maupun generasi penerus bangsa, terlebih lagi kurangnya peran serta dari pemerintah untuk memfasilitasi didalam meningkatkan mutu pendidikan hal itu yang menjadi penghambat dan menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Sehingga masalah pendidikan ini cukup menarik perhatian pemerintah. Pendidikan adalah hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Tanpa pendidikan, suatu negara akan jauh tertinggal dari negara lain. Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan dan kecerdasan intelektualnya agar menjadi manusia yang terampil, cerdas, serta berakhlak mulia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan Bab 2 pasal 3, menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari undang-undang tersebut sudah jelas bahwa pendidikan itu penting untuk dilakukan dan dilaksanakan bukan hanya untuk para anak-anak bangsa namun juga orang tua yang terlebih dahulu belum sama sekali mengetahui dan mengenal tentang dunia pendidikan.

Berdasarkan data Global Human Capital Report, diterbitkan World Economic Forum tahun 2017, peringkat Indonesia dalam urusan pendidikan menempati peringkat 65 dari 130 negara. Posisi itu masih jauh tertinggal dari negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), misalnya Singapura (12), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50). Beranjak dari situasi ini, pembenahan kualitas pendidikan menjadi salah satu tugas fundamental bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan “generasi emas” di tahun 2045.

Selain itu, bukti nyata dari kemerosotan pendidikan di Indonesia adalah terjadinya tawuran, tingkat pelajar maupun mahasiswa. Aksi tawuran yang biasanya dipicu masalah sepele, dampaknya sangatlah besar. Masyarakat di seluruh dunia akan menyaksikan lewat media cetak maupun elektronik amburadulnya pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut membuat ancaman yang cukup besar bagi bangsa Indonesia.

Di Indonesia sendiri tidak banyak Pemerintah Daerah yang berinovasi untuk memunculkan ide idenya dalam bidang pendidikan serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakatnya, khususnya dalam bidang pendidikan, hanya beberapa saja dari Pemerintah Daerah khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang berinovasi dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bondowoso.

Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019. Permasalahan ketertinggalan di Kabupaten Bondowoso adalah permasalahan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kemiskinan, dan permasalahan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yaitu infrastruktur sosial seperti sarana kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur seperti prasarana jalan yang kurang memadai. Permasalahan SDM yang terdapat di Kabupaten Bondowoso adalah belum

tercapainya sasaran utama pembangunan nasional yang terdapat pada RPJMN tahun 2015-2019 meliputi:

- a. Target rata-rata lama sekolah menurut RPJMN selama 8,25 tahun pada tahun 2014 sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso selama 6,09 tahun atau setara dengan tamatan Sekolah Dasar.
- b. Target angka harapan hidup penduduk nasional (AHH) selama 72 tahun, sedangkan angka harapan hidup di Kabupaten Bondowoso hanya selama 63,79 tahun.
- c. Target angka melek huruf (AMH) penduduk nasional sebesar 95,82% sedangkan AMH Kabupaten Bondowoso belum mencapai target yaitu masih sebesar 78,95 %.

Permasalahan berikutnya mengenai kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Bondowoso. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2018 sebesar 14 %. Kabupaten Bondowoso masih tergolong penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 290.729,- dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) sebesar 88,37. Persentase ini lebih besar dari pada target pada RPJMN yaitu 8-10% penduduk miskin, sedangkan di Kabupaten Bondowoso persentase penduduk miskin > 10%. Sementara jika dilihat dalam cakupan yang lebih sempit, jumlah rumah tangga miskin sebesar 131.900 rumah tangga.

Permasalahan lainnya di Kabupaten Bondowoso adalah rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Bondowoso, yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah. Pada aspek transportasi, sarana dan prasarana merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka memperpendek rentang kendali, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi manusia dan barang. Transportasi darat (jalan).

Dari hasil data menunjukkan bahwa Bondowoso sebagai Kabupaten tertinggal baik ditinjau dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dan juga pendidikan terlebih dalam bidang pendidikan. Syarat untuk keluar dari daerah tertinggal adalah dengan memperbaiki Indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Guna mencapai IPM yang bagus tentu harus adanya program-program guna meningkatkan dan mendorong IPM yang berkualitas baik dalam bidang kesehatan maupun bidang kesehatan, guna mendorong IPM di Kabupaten Bondowoso yang masih rendah. Dengan cara memunculkan inovasi-inovasi baru khususnya dalam bidang pendidikan seperti yang sudah dilakukan Pemerintah kabupaten Bondowoso saat ini, yaitu dengan adanya Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA). Ketentuan mengenai kesetaraan ini diatur dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26, ayat (6):

"Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan."

Program tersebut dikenal dengan singkatan "GETAR DESA". Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) ini merupakan inovasi yang di kelola dan di kembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya.

Berdasarkan Perbub No 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Getar Desa dikembangkan untuk menjawab kondisi pendidikan di Kabupaten Bondowoso yang sangat memprihatinkan saat ini, dalam sosialisasi Program Pembangunan Pendidikan tahun 2017 di jelaskan bahwa rata-rata lama di sekolah (usia 25 tahun ke atas) mencapai 5,57 tahun, sehingga hal tersebut berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (data BPS 2017 : 64,75) yang menyebabkan Kabupaten Bondowoso mendapat Predikat salah satu Kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Untuk saat ini ada sekitar 277.839 orang usia di atas 25 tahun yang tidak bersekolah, dan 116.460 orang usia 25 tahun sampai 45 tahun yang tidak bersekolah.

Melihat kondisi seperti hal yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “IMPLEMENTASI GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA (GETAR DESA)” (Studi di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah Bagaimana Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) khususnya di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa (GETAR DESA). di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang :

- a. Mendeskripsikan tentang Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa khususnya di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- b. Mendeskripsikan Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Getar Desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso mengenai Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Bebasis Desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Secara rinci, umpan balik Implementasi ini meliputi:

- a. Hasil analisis Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Bebas Desa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
- b. Hasil analisis Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Bebas Desa yang telah dilakukan oleh Desa Patemon beserta dengan Penyelenggara PKBM.
- c. Saran penyempurnaan kebijakan tentang Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Kebijakan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.